

PENGARUH TINGKAT KEMAKMURAN DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dafid Cristian Manoppo¹, Robert R. Winerungan², Linda A.O. Tanor³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: 18304031@unima.ac.id¹, Robertwinerungan@unima.ac.id², Lindatanor@unima.ac.id³

Diterima: 30-05-2022 Disetujui: 30-01-2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan, dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, pembagian angket/kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil dan pembahasan ditemukan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat memberikan implikasi bahwa dengan adanya peningkatan tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit yang positif, baik dan tepat, maka akan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci; Tingkat Kemakmuran Daerah, Temuan Audit, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the level of regional prosperity and audit findings. This research method uses a quantitative approach. And the sample in this study were 35 employees, the sampling technique used *random sampling*. The data collection technique was, observation, questionnaire/questionnaire distribution, and documentation. The data analysis technique used was multiple regression analysis. Based on the results and discussion, it was found that there was a positive and significant effect between the level of regional prosperity and audit findings on the financial performance of local governments. This can imply that with an increase in the level of regional prosperity and positive, good and appropriate audit findings, it will be able to improve the financial performance of local governments.

Keywords; Regional Prosperity Level, Audit Findings, Regional Government Financial Performance

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap pemerintah daerah diberi wewenang dalam melaksanakan kewenangan hak daerahnya. Maju atau mundurnya suatu daerah ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah dengan baik. Pemerintah daerah dapat mengeksplor keunggulan daerahnya dalam rangka pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pembangunan daerah pun tidak lepas dari pada aspek fisik seperti fasilitas sosial dan fasilitas publik yang layak, tetapi juga pada aspek hidup dan kehidupan manusia (Saifudin 2020). Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah (Rahmat 2021). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam mendukung jalannya roda pemerintahan (Metalia 2017). Tingkat kesejahteraan daerah yang masih kurang merata, kinerja pengelolaan keuangan daerah kurang transparansi dan tingkat efisiensi kabupaten minahasa selatan yang masih kurang (Mega Oktavia 2016). Sehingga pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai pelayanan publik yang baik, bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan dengan efektif, efisiensi, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dalam memulihkan kinerja dan pelaksanaannya (Plyriadi 2019). Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial (Ropa, Sam, dan Manado 2016). Menurut penelitian yang dilakukan (Yoewono 2019) terdapat beberapa masalah umum yang terjadi pada kinerja keuangan daerah meliputi, kesenjangan fiskal yang lebar antara penerimaan yang sedikit dengan pengeluaran yang besar, kebutuhan fiskal yang belum bisa ditopang dengan kemampuan dan kapasitas daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran, masih tingginya alokasi dasar (biaya aparatur sipil negara), masih besarnya peran dan investasi pemerintah pusat dalam penentuan objek dan jenis pajak serta retribusi daerah. Sedangkan yang dilakukan (Zuhri, Ekonomi, dan Dehasen 2017) pada kabupaten kour provinsi Bengkulu menemukan beberapa masalah yakni, masih minimnya evaluasi kinerja keuangan daerah, kurang transparan mengenai laporan keuangan daerah dan tingkat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang masih kurang.

Kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemampuan mencukupi kebutuhan diukur dari besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi sumber keuangan sehingga memperkecil ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat (Banda 2021). Kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berdampak kepada masyarakat (Kiswanto 2017).

Temuan audit merupakan temuan oleh BPK terhadap kasus-kasus pada laporan keuangan berupa ketidak sesuaian dan kerancuan dengan realisasi laporan serta teridentifikasi sebagai suatu pelanggaran (Ditasari dan Sudrajat 2020). Proses audit sangatlah penting karena untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pembuktian yang dilakukan oleh auditor dengan pencapaian suatu kinerja tidak lepas dari laporan pemeriksaan oleh audit kinerja dalam menilai sejauh mana pencapaian dari kinerja keuangan pemerintah daerah (Setyo 2018). Tujuan audit adalah meningkatkan kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju (Azizah 2018). Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya, karena buruknya kepatuhan terhadap perundang-undangan akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah (Alpi 2018).

Dalam penelitian ini teori keagenan menjadi *grand* teori. Teori keagenan menurut Jansen dan Meckling (1976) adalah "suatu kontrak dibawah satu atau lebih yang melibatkan

agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*" (Surepno 2017), menjelaskan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu atau beberapa orang pemilik sumber daya ekonomis (sebagai prinsipal) dengan orang lain (sebagai agen) dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan kegiatan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agen adalah pemerintah sedangkan pihak yang menjadi prinsipal adalah masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (Ditasari dan Sudrajat 2020). Masyarakat sebagai prinsipal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mendapati hasil tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan (Syiah, 2017) pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan (Nur Ade, 2016) memiliki pengaruh positif tingkat kemakmuran dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Masdiantini dan Erawati 2016) mendapatkan hasil yang menyatakan tingkat kemakmuran dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Kemakmuran Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan, Ketika kemakmuran suatu daerah sudah baik maka dapat dilihat dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan manusia untuk mendorong perbaikan infrastruktur, Infrastruktur suatu daerah yang baik maka tingkat kesejahteraan suatu daerah akan semakin baik (Kiswanto 2017). Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kemakmuran adalah kemampuan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier (Mankiw 2019), Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati dan Jaeni 2018), menunjukkan kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini karena kemakmuran mampu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kab/kota di Jawa Tengah, semakin tingginya tingkat kemakmuran yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian oleh (Masdiantini dan Erawati 2016) ditemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Sementara variabel kemakmuran, intergovernmental revenue dan temuan audit BPK berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Berdasarkan hasil (Azizah 2018), Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan program SPSS 23 dan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji hubungan tingkat kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti menduga bahwa semakin baik tingkat kemakmuran daerah maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H: Terdapat pengaruh positif tingkat kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Temuan Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah, ketidak efisienan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan (Setyo 2018), menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alpi 2018), penelitiannya mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit badan pemeriksa keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota, Hasil penelitiannya menunjukkan Karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, belanja daerah) dan temuan audit BPK (temuan audit terhadap SPI dan temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemda Kab/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Afif 2018), temuan pada penelitian ini mengindikasikan bahwa secara parsial variabel opini audit dan tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap persepsi korupsi, sedangkan variabel temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi korupsi. Secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho 2018) diperoleh kesimpulan bahwa level variabel dependen terpusat dan pembiayaan regional memberikan efek positif. Pengukuran dari legislature memberikan efek negatif dan signifikan pada kinerja dari keuangan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini yakni, untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada badan pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Terdapat pengaruh positif temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang pertama, Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat kemakmuran daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang kedua untuk mengetahui apakah ada pengaruh temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan PAD yang diperolehnya, Indikator dalam penelitian ini yaitu, Indikator masukan (*input*), Indikator proses (*Process*), Indikator keluaran (*output*), Indikator hasil (*outcomes*), Indikator dampak (*impact*).

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan, Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga

berbeda, Indikator dalam penelitian ini yaitu, Pendapatan perkapita, Struktur ekonomi, Urbanisasi, Indeks Kualitas, Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Temuan audit merupakan himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan Indikator dalam penelitian ini yaitu, Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, Penyimpangan yang sering terjadi, Faktor yang menyebabkan kesalahan dalam kinerja keuangan, Temuan audit yang paling lama penyelesaian tindak lanjut, Jumlah kasus (Afif 2015).

Populasi dalam penelitian ini yaitu pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 35 orang pegawai teknik pengambilan sampel menggunakan yaitu *random sampling*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, Observasi yaitu berupa data-data mengenai profil dari responden, struktur organisasi, Angket/Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab berdasarkan daftar pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian untuk mengungkapkan data- data yang berkaitan, dan Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan pembagian angket/kuesioner dapat diperkuat dengan adanya dokumentasi berupa gambar/foto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, teknik analisis data ini menggunakan alat bantu SPSS. Setelah data penelitian berupa jawaban responden atas angket yang dibagikan dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan berpedoman pada analisis regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- a = konstanta
- b_1, b_2 = Koefisien regresi ganda
- X_1 = Tingkat Kemakmuran Daerah
- X_2 = Temuan Audit
- e = *error of term*

Hasil dan Pembahasan

Data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, kemudian peneliti mendeskripsikan tentang identitas responden dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analisis data regresi berganda, identitas responden ini meliputi, Nama, umur jenis kelamin, peneliti menggunakan alat bantu pengujian yaitu dengan Perangkat lunak (*software*) SPSS (*Statistical product and service solution*) IBM, versi 25.0 for windows.

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada setiap kuesioner/angket yang telah disebarkan, pengujian ini merupakan syarat sebelum pengujian regresi berganda penelitian ini dapat dapat dilanjutkan jika setiap butir pertanyaan valid dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran mampu mengukur apa yang ingin diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Dan Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel ator atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel. dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,70.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas tingkat kemakmuran daerah, temuan audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} dari setiap item pertanyaan, nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Maka dapat dikatakan bahwa setiap butir pertanyaan dari variabel (X_1 , X_2 dan Y) dinyatakan Valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen tingkat kemakmuran daerah nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien Cronbach Alpha >0,7, yakni sebesar 0,957, sementara instrumen temuan audit menunjukkan bahwa Cronbach Alpha >0,7, yakni sebesar 0,962, sementara itu juga reliabilitas instrumen kinerja keuangan pemerintah daerah, nilai variabel tersebut menunjukkan koefisien Cronbach Alpha >0,7, yakni sebesar 0.97, sehingga dapat dikatakan bahwa Variabel (X_1 , X_2 dan Y) dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,200 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Besar nilai signifikansi nilai absolute $0,075$, nilai positif $0,064$ dan negatif $-0,074$ karena nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari $0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance variabel tingkat kemakmuran daerah X_1 $0,960$ dan variable temuan audit X_2 $0,960$ lebih dari $0,100$ dan nilai VIF X_1 dan X_2 1.042 kurang dari $10, 00$. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas maka disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas dikarenakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplot, titik-titik menyebar di atas X di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Tabel 1. Ouput Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	20.739	8.650		2.397	.019		
Tingkat Kemakmuran Daerah	.276	.130	.244	2.129	.037	.960	1.042
Temuan Audit	.255	.127	.231	2.014	.048	.960	1.042

Sumber: Data Output SPSS diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 20.739 + 0.276 X_1 + 0.255 X_2$$

Dari hasil uji regresi berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Constant a sebesar 20.739 artinya apabila semua variabel bebas (tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit) dianggap konstan atau bernilai 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 20.739, Koefisien regresi tingkat kemakmuran daerah 0,276

artinya apabila tingkat kemakmuran daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satu persen sedangkan variabel bebas lainnya dianggap konstan maka kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 0,276, Koefisien regresi temuan audit sebesar 0,255 artinya apabila temuan audit mengalami kenaikan sebesar 1 satu persen sedangkan variabel bebas lainnya dianggap konstan maka kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami kenaikan sebesar 0,255.

Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a		
Model	t _{hitung}	t _{tabel}
1 (Constant)	2.397	
Tingkat Kemakmuran Daerah	2.129	1.993
Temuan Audit	2.014	1.993

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Output SPSS diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian coefficient diperoleh hasil dari tabel t_{hitung}, yang dibandingkan dengan nilai T_{tabel} menggunakan rumus: $(\alpha/2 ; n - K - 1) = (0,05/2 ; 75 - 2 - 1) = (0,025 ; 72)$ dimana α adalah nilai alfa, n adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel independen (X), sehingga mendapatkan hasil T_{tabel} = $(0,05/2; 75-2-1) = (0,025; 72)$ Berdasarkan tabel T 0,025 dan df 72 diperoleh T_{tabel} = 1.933, Nilai T_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T_{tabel} yaitu variabel tingkat kemakmuran daerah X₁ = 2.129 > 1,993 dan Variabel temuan audit X₂ = 2,014 > 1,993 dengan demikian dapat dikatakan ada pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten minahasa selatan.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.301 ^a	.090	.065	9.956	2.032

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemakmuran Daerah, Temuan Audit

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : output SPSS for Windows release versi 25

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,090. Hal ini berarti bahwa 0,090 % Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) ditentukan oleh variabel tingkat kemakmuran daerah (X₁), dan temuan audit (X₂), sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan alokasi Dana sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Untuk menguji hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, maka peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pusat maka akan semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan yakni sebesar 2.129, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Ernawati dan Jaeni 2018), Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah, ketidak efisienan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Noviyanti dan Kiswanto 2016). variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ditasari dan Sudrajat 2020), menyatakan bahwa temuan BPK audit merupakan kumpulan kasus-kasus yang ditemukan oleh BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah atas suatu pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya temuan ini BPK meminta agar adanya peningkatan koreksi dan pemeriksaan. Dengan begitu, semakin besar jumlah temuan BPK maka kinerja pemerintah daerah dinilai semakin rendah, Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pengaruh signifikan yakni sebesar 2.014, hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Alpi 2018), Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan ada pengaruh signifikan antara temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat disimpulkan, Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat Kemakmuran Daerah Dan Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat memberikan Implikasi. bahwa

dengan adanya peningkatan tingkat kemakmuran daerah dan temuan audit yang positif, baik dan tepat, maka akan dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Bagi Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Di harapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai peningkatan kemakmuran daerah khususnya di daerah kabupaten minahasa selatan, Bagi penelti selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan reerensi mengenai Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah dan juga bisa menambah pengetahuan dan pengambilan keputusan mengenai peningkatan kemakmuran daerah khususnya di daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Daftar Pustaka

- Achmad, Abu, Ratna Septiyanti, And Mega Metalia. 2017. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, Dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 22 (1): 1–14.
- Afif. 2015. "Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" X (X).
- Afif, M. Faathir. 2018. "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember." *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, 3.
- Akuntansi, Magister, Program Pascasarjana, Universitas Syiah, And Kuala Banda. 2017. "Pengaruh Ukuran Legislatif, Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun 2010 S.D 2014)." *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 8 (1): 49–58.
- Alpi, M. Firsya. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota." *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2 (3): 135–40.
- Azizah, Farah Noor. 2018. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 11 (1): 1–5. [Http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0Ahttps://Doi.Org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://Www.Chile.Bmw-Motorrad.Cl/Sync/Showroom/Lam/Es/](http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0Ahttps://Doi.Org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://Www.Chile.Bmw-Motorrad.Cl/Sync/Showroom/Lam/Es/).
- Banda, Kuala. 2021. "Pengaruh Ukuran Legislatif , Kemakmuran Pemerintah Daerah , Ukuran Pemerintah Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten / Kota Di Aceh Tahun 2010 S . D 2014)" 8 (1): 49–58.
- Ditasari, Rollis Ayu, And M. Agus Sudrajat. 2020. "Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur." *IVENTORY: Jurnal Akuntansi* 4 (2): 104–17.
- Ernawati Dan Jaeni. 2018. "Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017) Ernawati." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 7 (1): 73–81.
- Kiswanto, Noviyanti &. 2017. "Pengaruh Kemakmuran, Intergovernmental Revenue Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah," 1–8.
- Mankiw. 2019. "Pengaruh Investasi Terhadap Kemakmuran," 8–27.
- Masdiyantini, Putu Riesty, And Ni Made Adi Erawati. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada

- Kinerja Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi* 14 (2): 1150–82.
- Noviyanti, Nur Ade, And Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Accounting Analysis Journal* 5 (1): 1–10.
- Nugroho, Tatas Ridho. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur." *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan* 7 (1): 27. <https://doi.org/10.25273/Jap.V7i1.1823>.
- Ropa, Mega Oktavia, Universitas Sam, And Ratulangi Manado. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan." *EMBA* 4 (2): 738–47.
- Saifudin, Ahmad. 2020. "Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." *Pharmacojournal Ilmiah Farmasi-UNSRAT* 9 (1): 258–63.
- Setyo. 2018. "Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1–11.
- Surepno. 2017. *Pengaruh Return On Equity (Roe), Ukuran (Size), Dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Indonesia Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang Oleh.*
- Syahputra, Ahmad Ali, And Mujibur Rahmat. 2021. "Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa." *JAJA: Journal Of Accounting, Finance And Auditing* 3 (1): 46–58.
- Tahir, Irmayunita, Masdar Mas'ud, And Annas Plyriadi. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar." *Jurnal Riset Bisnis* 93 (1): 66–74.
- Yoewono, Harsono. 2019. "Analisa Kinerja Keuangan 34 Provinsi Indonesia Di Tahun 2018." *STIEI* 28 (02): 170–97.
- Zuhri, Muhammad, Fakultas Ekonomi, And Universitas Dehasen. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur," 187–95.